

ABSTRAK

Kelayakan tempat tinggal atau hunian menjadi aspek penting yang harus di perhatikan dalam perumahan. Perumahan atau rumah yang layak huni akan berdampak kepada kenyamanan keamanan dan kesehatan yang akan dirasakan oleh konsumen. Akan tetapi pembangunan perumahan yang tidak layak masih terus terjadi.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan regulasi tentang standar kualitas rumah bersubsidi berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan kawasan pemukiman dan pengaturan mengenai tanggung jawab PT X atas produk cacat menurut undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. dan mengetahui implementasi standar kualitas rumah bersubsidi diterapkan oleh PT X dan pertanggung jawabannya kepada konsumen

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan atau bahan pustaka yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perumahan Kawasan Dan Pemukiman dan berbagai literatur. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis berupa penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan perlindungan konsumen dan Perumahan Kawasan Pemukiman. Dan Metode teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan library research dan studi lapangan berupa bahan hokum primer, hokum sekunder dan hokum tertier. Metode analisis yang digunakan dengan cara deskriptif kualitatif

Hasil penelitian peraturan mengenai standar kualitas perumahan dan tanggung jawab. peraturan ini sudah memadai untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen perumahan. Standar kualitas perumahan yang memenuhi syarat kriteria rumah layak huni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UUPERKIM, PERMEN dan UUPK, PT X masih belum melaksanakannya dengan baik. Pelaksanaan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam UUPK juga tidak sama sekali dilaksanakan oleh PT X.

Kata Kunci: Produk Cacat, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab

ABSTRACT

The feasibility of a place to live or occupy is an important aspect that must be considered in housing. Housing or a house that is suitable for habitation will have an impact on the comfort, safety and health that will be felt by consumers. However, inadequate housing development continues.

Therefore, this study aims to determine the regulatory arrangements regarding the quality standards of subsidized houses based on law number 1 of 2011 concerning housing in residential areas and regulations regarding the responsibility of PT X for defective products according to law number 8 of 1999 concerning consumer protection. and knowing the implementation of subsidized housing quality standards implemented by PT X and its responsibility to consumers

The method used in this study uses a normative juridical approach, namely research is carried out by researching and / or library materials, namely the Consumer Protection Law, the Law on Housing and Settlements and various literatures. The research specifications are descriptive analytical in the form of analyzing legal provisions applies and is analyzed using theories relevant to consumer protection and residential areas. And the data collection technique method is library research and field studies in the form of primary, secondary and tertiary law materials. The method of analysis used is descriptive qualitative

Results of regulatory research regarding housing quality standards and responsibilities. This regulation is sufficient to guarantee order, legal certainty and justice for both business actors and housing consumers. Housing quality standards that meet the criteria for habitable housing as stipulated in the Law on UUPERKIM, PERMEN and UUPK, PT X has not implemented it properly. PT X has not implemented the responsibility as stipulated in the UUPK at all.

Keywords: Defective Products, Consumer Protection, Responsibility